

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Apeldoorn, L.J. van., 1993, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.
- Black, Henry Campbell., 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co., St. Paul, Minnesota, USA.
- Budiarjo, Miriam., 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Erwin, Moh., 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1999, *Filasafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad., 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi., Anggraini, Anna Maria Tri., Toha, Kurnia., Kagramanto, Budi., M. Hawin., Sirait, Ningrum Natasya., Sukarmi., Maarif, Syamsul., Silalahi, Udin., 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Marwah, Diah M., 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*, Literata Lintas Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Pasha, Musthafa Kamal., Lasijo., Mudjijana., Muqodas, Fahmi., 2002, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Pierson, Christopher., 2007, *Welfare State: The New Political of Welfare*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- Rahardja, Pratama., Manurung, Mandala., 2006, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rawl, John, 1999, *A Theory of Justice*, The President and Fellowship of Harvards University Press, New York, USA.
- Simarmata, Henry T., 2008, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya., 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bunga Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono., 2016, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y., 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.
- Triwibowo, Darmawan., Bahagijo, Sugeng., 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

Usman, Rachmadi., 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warassih, Esmi., 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Yudho, Winarno., 2002, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten: Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosebroto*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

2. Artikel Jurnal

Anggraini, A.M. Tri., “Aspek Monopoli atas Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2, No.4, Februari 2010.

Asshiddiqie, Jimly., “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 2, 2013.

Ferragina, Emanuele., Seeleib-Kaiser, Martin., “Welfare Regime Debate: Past, Present, Futures”, *Policy and Politics*, Vol.39, No.4, 2011.

Posner, Richard A., “The Social Cost of Monopoly and Regulation”, *Journal of Political Economy*, Vol.83, Agustus 1975.

Sjahdeini, Sutan Remy., “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.10, 2000.

Suastama, Ida Bagus Radendra., “Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan”, *Mimbar Hukum*, Vol.24, No.2, Juni 2012.

V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, No.1, Agustus 2020.

Wantu, Fence M., “Antinomi dalam Penegakah Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.19, No.3, Oktober 2007.

3. Makalah/Perkuliahan

Triatmodjo, Marsudi., “Teori Hukum”. Bahan Ajar Perkuliahan Teori Hukum pada Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21 November 2020.

4. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 28 Februari 2022.

Berdikari, “Bisnis Kami”, <https://berdikari-persero.co.id/>, diakses pada 16 Mei 2022.

Bisnis.com, “Usung Nama ID FOOD, Holding BUMN Pangan Resmi Diluncurkan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220112/12/1488245/usung-nama-id-food-holding-bumn-pangan-resmi-diluncurkan>, diakses pada 16 Mei 2022.

Britannica Encyclopedia, “Welfare State”, <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>, diakses pada 13 April 2022.

Bulog, “Bisnis”, <http://www.bulog.co.id/bisnis/produk/>, diakses pada 16 Mei 2022.

Garam, “Produk”, <https://www.ptgaram.com/Barang>, diakses pada 16 Mei 2022.

Merdeka.com, “4 Perusahaan Pembuat Peralatan Canggih Militer Asal Indonesia”, https://www-merdeka-com.translate.google/peristiwa/4-perusahaan-pembuat-peralatan-canggih-militer-asal-indonesia.html?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc, diakses pada 15 Mei 2022.

Perikanan Indonesia, “Produk”, <http://www.perikananindonesia.co.id/100-produk>, diakses pada 16 Mei 2022.

Pindad, Konsolidasi 6 BUMN Industri Strategis, NDHI Gelar Rapat Koordinasi di Bali”, <https://www.pindad.com/konsolidasi-6-bumn-industri-strategis-ndhi-gelar-rapat-koordinasi-di-bali>, diakses pada 15 Mei 2022.

Sang Hyang Seri, “Produk”, <http://ptsanghyangseri.co.id/>, diakses pada 16 Mei 2022.

Tirto.id, “Sejarah Tiga Produsen Alutsista Indonesia”, <https://tirto.id/sejarah-tiga-produsen-alutsista-indonesia-gafU>, diakses pada 15 Mei 2022.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2657).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 52).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, PN Barata, dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangun Negara (PN) Perhubungan Udara “Garuda Indonesian Airways” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 87).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara “Pelayaran Nasional Indonesia” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973).

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Perkapalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1).
- Peraturan Pemerintah 4 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Logam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 4).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21).
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kodja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 34).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 50).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96).

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441).
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15).
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138).
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105).
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106).
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.